KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH INKLUSIF DI SMPN 2 KUNDURAN BLORA, JAWA TENGAH

Faiq Hammam Nur Aufa¹, Nina Widowati², Maesaroh³

Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos.1269 Telepon (024)7465407 Faksimile (024)7465405

Laman: http://www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research aims to explain the Analysis of the Quality of Inclusive Education Services at SMPN 2 Kunduran Blora, Central Java. The provided services are not optimal because there are no supporting facilities for inclusive children, no special assistant teachers, and damaged road conditions. This is qualitative descriptive research. The data are collected using interviews, documentation, and literature reviews. This research uses an accidental technique, snowballing sampling, and service theory to examine and identify some factors that disrupt the implementation of inclusive services at SMPN 2 Kunduran Blora, Central Java. The results show that inclusive services are not yet implemented optimally. It can be seen from the service indicators that include Tangible, Reliable, and Access (ease of accessing communication and location). There are no supporting media for children with disabilities, and the school does not have special assistant teachers. Besides, the roads which lead to SMPN 2 Kunduran are badly damaged. Some factors that disrupt the inclusive services such as no supporting infrastructure for the children with special needs, the teachers do not yet have specific competence to educate the children with special needs, and bad road conditions. The researchers suggest that SMPN 2 Kunduran should conduct a rolling system for the teachers of children with special needs to teach at SMPN 2 Kunduran at least once a week. Special training should also be held for homeroom teachers based on inclusion programs. These recommendations also apply to future researchers who want to study inclusive schools in the Blora regency.

Keywords: Quality, Services, Inclusive.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah salah satu dari pelayanan dasar yang wajib diperoleh oleh setiap warga negara di Indonesia. Kewajiban untuk memperoleh pendidikan telah tertuang pada Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwasanya seluruh warga negara yang tinggal di Indonesia wajib mendapatkan pendidikan. Lahirnya konsep *education* for all berperan lebih luas dalam pembenahan sistem pendidikan secara menyeluruh kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan tanpa melihat suku, ras, agama dan kondisi fisik.

Bagi orang yang memiliki keterbatasan fisik atau difabel yang hidup ditengah masyarakat umum tentu akan membatasi kegiatan seorang difabel, fasilitas umum yang tersedia didesain untuk orang umum yang sehat rohani dan jasmani, sehingga belum ada sarana dan prasaran untuk penyandang difabel.

Di Indonesia, orang yang mengalami kondisi khusus difabel setara dengan atau penduduk normal pada umumnya, hal ini telah diatur pada Undang Undang 1945 27 ayat (1) Pasal yang menjelaskan bahwasanya untuk Indonesia penduduk yang memiliki keterbatasan fisik atau mental wajib mendapat perlidungan khusus dari pemerintah agar tidak terjadi kasus hak asasi manusia.

Untuk anak yang berkebutuhan khusus yang mendapat ingin pendidikan formal. pemerintah menciptakan sebuah model sistem pendidikan yang dinamakan pendidikan Inklusif. Pendidikan Inklusif merupakan sekolah regular yang menerima murid normal dan berkebutuhan dalam kelas. khusus satu Pendidikan inklusif lahir dari rasa ketidakuasan dari sistem pendidikan segresi atau pemisahan antara pendidikan reguler dengan pendidikan luar biasa dan menjadi jembatan untuk anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pelayanan pendidikan sekolah formal.

Penerapan sekolah inklusif di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri no. 70 Tahun 2009 Tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa.

Berkaitan dengan pendidikan inklusif. Jawa Tengah masih tertinggal dalam penyelenggara sekolah inklusif dengan Jawa Timur sebanyak 478 unit sekolah dan Jawa Barat 496 dengan unit sekolah. Provinsi Jawa Tengah hanya memiliki total 337 unit yang tersebar diseluruh Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Blora merupakan salah satu provinsi di Jawa Tengah yang ikut menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kabupaten Blora

memiliki total 6000 penyandang dan 486 diantaranya adalah anak anak yang baru terdaftar melalui pendataan yang mencantumkan jenis disabilitas dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang baru menyasar di 5 Sekolah Luar Biasa (SLB).

Blora Kabupaten memiliki dua sekolah menengah pertama (SMP) yang ditunjuk menjadi sekolah inklusif melalui keputusan Bupati No. 420/602.A/ 2011 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Dasar Sebagai Pendidikan Penyelenggara Inklusif di Kabupaten Blora Tahun 2011. Ada alasan khusus SMPN 2 Kunduran menjadi sekolah inklusif yaitu berdekatan dengan SDN 3 Botoreco yang merupakan penyelenggara sekolah dasar inklusif sehingga akan memudahkan siswa inklusif SDN 3 Botoreco untuk

meneruskan pendidikan di SMPN 2 Kunduran.

Pada tahun ajaran 2019/2020 SMPN 2 Kunduran memiliki total 374 siswa dari kelas 7 sampai 9 yang terdiri dari 13 rombongan belajar. Jumlah siswa yang memiliki kondisi khusus atau adalah 18 siswa yang memiliki jenis inklusi lamban belajar atau slow learner.

Jumlah total siswa inklusif 18 siswa yang tersebar dari kelas 7 sampai 9 akan membutuhkan pendampingan khusus. Hal ini tidak dibarengi dengan SMPN 2 Kunduran memiliki tidak fasilitas penunjang khusus untuk siswa inkluisf. pendamping guru khusus yang memiliki latar belakang pendidikan sekolah luar biasa, sehingaa mengalami kesulitan dalam melayani siswa inklusif kondisi jalan dan menuju lokasi **SMPN** 2 Kunduran sudah rusak parah.

Berdasarkan kajian singkat terhadap penelitian terdahulu yang memiliki fokus yang serupa, maka penulis menemukan beberapa persamaan dengan uraian latar belakang masalah yang serupa, misalnya disebutkan bahwa aspek *reliable* atau kompentensi guru pendamping yang menjadi pengajar di sekolah inklusif.

Terdapat kebaruan dalam penelitian antara peneliti dengan topik penelitian dalam penulisan ini. Dilihat dari segi hasil penelitian yang ditulis Sulthon dalam jurnal oleh "Pendidikan Dasar Inklusif Kabupaten Pati : Harapan dan Kenyataan" dikatakan bahwa keberjalanan sekolah inklusif di Kabupaten Pati belum berjalan optimal karena masih terkendala bahwasanya belum semua anak difabel mendaftar di sekolah inklusif dan belum memiliki pendamping khusus.

Uraian latar belakang yang telah dijelaskan menimbulkan ketertatikan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai permasalah yang terkait dengan kualitas pelayanan sekolah inklusif di SMPN 2 Kunduran Blora, Jawa Tengah sehingga diharapkan penelitian ini mampu menemukan solusi yang tepat dan menjadi rekomendasi bagi peneliti dimasa depan yang ingin meneliti sekolah inklusif di Kabupaten Blora.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimanakah kondisi pelayanan inklusif di SMPN 2 Kunduran Blora, Jawa Tengah?
- 2. Apakah aspek yang menghambat dalam pelayanan sekolah inklusif di SMPN 2 Kunduran Blora, Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

- Menganalisis kualitas pelayanan SMPN 2 Tengah.
- Mengindentifikasi aspek penghambat dalam melayani siswa yang memerlukan kebutuhan khusus di SMPN 2 Kunduran Blora, Jawa Tengah.

D. Tinjauan Pustaka

Administrasi Publik
 Hadari Nawawi
 mengungkapkan bahwa
 administrasi merupakan usaha
 kerjasama oleh kelompok untuk
 mengendalaikan tujuan agar
 tetap berjalan sesuai dengan

arahnya. (Syafiie, 2015)

- 2. Manajemen Publik

 Manajemen publik merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengelola sebuah sumber daya manusia dan sumber daya alam guna memperoleh hasil yang maksimal secara efektif dan efisien. Untuk mengelola sesuatu diperlukan kemampuan dan ketrampilan yang diperoleh melalui hasil yang dilakukan oleh orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Dyah Hariani.2017)
- Kualitas Pelayanan Publik
 Zeithaml, Parasuraman dan
 Berry menilai kualitas publik
 didasarkan kepada kepusan oleh
 pengguna yang merasakan

pelayanan yang dipengaruhi oleh aspek baik atau buruk dari penyedia layanan. (Hidayah, 2020).

- 4. Dimensi Kualitas Pelayanan Publik
 Kualitas pelayan publik memiliki dimensi dimensi sebagai tolak ukur untuk menilai pelayanan dari penyedia layanan publik, Zeithaml menilai bahwa didalam dimensi kualitas pelayanan publik terdiri dari:
- 1. *Tangible* (Berwujud), bentuk yang berwujud dari pelayanan.
- Reliable (Kehandalan), kemampuan yang dimiliki oleh pegawai pemberi layanan.
- 3. Responsiveness (Ketanggapan), respon dari penyedia layanan saat bertemu dengan pengguna.
- 4. *Emphaty* (Perhatian), perhatian yang diberikan oleh penyedia layanan untuk kenyamanan pengguna.
- Acces (Kemudahan), tempat dan cara untuk menjangkau atau menghubungi penyedia layanan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif untuk mengetahui lebih dalam untuk mengetahui analisis kualitas pelayanan sekolah inklusif di SMPN 2 Kunduran Blora, Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan, mendiskripsikan dan menggambarkan keaslian secara faktual dan akurat tentang suatu fakta dan sifat dari fenomena yang sedang diteliti. Situs Penelitian adalah SMPN 2 Kunduran sebagai lokus utama atau tempat melaksanakan penelitian. Teknik pengambilan sampling menggunakan teknik Accidental samping dan snowballing melalui sampling proses wawancara secara konvensional, daring dan dokumentasi. Subjek penelitian antara lain yaitu:

> Kepala Sekolah SMPN 2 Kunduran,

- Wakil Kepala Sekolah SMPN 2 Kunduran,
- 3. Guru BK SMPN 2 Kunduran,
- 4. Walimurid siswa inklusif
- 5. Siswa normal

HASIL DAN PEMBAHASAN

 Identifikasi temuan dan analisis pada penelitian kualitas pelayanan sekolah inklusif di SMPN 2 Kunduran Blora, Jawa Tengah

Dalam keberjalanan menjadi salah satu penyelenggara sekolah inklusif di Kabupaten Blora, SMPN 2 Kunduran belum memenuhi standar sebagai penyelenggara sekolah inklusif, berikut adalah aspek yang belum memenuhi standar dari pelayanan sekolah inklusif

1. *Tangible* (Berwujud)

Berkaitan dengan aspek tangible atau berwujud dengan salah indikator yaitu kelengkapan fasilitas khusus dan sarana prasana untuk menunjang anak inklusif di SMPN 2 Kunduran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Guru BK SMPN 2 Kunduran,

aspek tangible tidak memenuhi standar kualitas pelayanan sekolah inklusif dengan kondisi bahwa SMPN 2 Kunduran tidak memiliki fasilitas atau sarana prasarana untuk menunjang anak inklusif dalam proses kegiatan belajar mengajar.

2. *Reliable* (Kehandalan)

Berkaitan dengan aspek reliable atau kehandalan yang dimiliki oleh guru SMPN 2 Kunduran dalam menangani anak inklusif dengan indikator kompetensi guru pendamping khusus di SMPN 2 Kunduran. Berdasarkan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMPN 2 Kunduran aspek reliable atau kehandalan yang dimiliki oleh guru SMPN 2 Kunduran tidak memenuhi standar kualitas pelayanan sekolah inklusif dengan melihat beberapa kondisi bahwa SMPN 2 Kunduran tidak memiliki guru pendamping khusus yang memiliki latar belakang pendidikan sekolah luar biasa dan saat melakukan wawancara dengan

Guru BK, pelatihan khusus yang diberikan hanya satu kali pelatihan dengan melakukan studi banding di Semarang, setelahnya tidak ada pelatihan lagi sehingga para guru kurang memiliki pengetahuan untuk menangani siswa inklusif yang bersekolah di SMPN 2 Kunduran.

3. *Responsiveness* (Ketanggapan)

Berkaitan dengan asek responsiveness atau ketanggapan yang dimiliki oleh SMPN 2 Kunduran dalam menangani anak inklusif. Berdasarkan hasil wawancara Wakil Kepala Sekolah **SMPN** 2 Kunduran aspek responsiveness yang dimiliki oleh guru di SMPN 2 Kunduran sudah memenuhi standar kualitas pelayanan sekolah inklusif dengan melihat bahwa salah satu visi dari **SMPN** Kunduran adalah keramahan kepada difabel. SMPN 2 Kunduran bekerjasama dengan sekolah inklusif atau sesama Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk saling *sharing* masalah yang dialami lalu kemudian mencari solusi bersama dan Guru BK setiap seminggu sekali akan masuk ke setiap kelas untuk memberikan edukasi tentang rasa toleransi dan saling menghargai sehingga mencegah tindakan intimidasi atau bullying kepada anak inklusif.

4. *Emphaty* (Perhatian)

Berkaitan dengan aspek *emphaty* atau perhatian yang diberikan pihak SMPN 2 Kunduran kepada anak inklusif telah memenuhi standar kualitas pelayanan sekolah inklusif yang dapat dilihat meskipun tidak memiliki guru pendamping khusus, SMPN 2 Kunduran berupaya untuk membuat nyaman anak inklusi dengan cara menempatkan mereka di bangku paling depan agar guru dapat selalu memantau dan mengawasi dengan seksama proses perkembangan belajar anak inklusi agar dapat belajar seperti anak normal.

Acces (Kemudahan melakukan kontak)

Berkaitan dengan aspek acces atau kemudahan di SMPN 2 Kunduran indikator kemudahan dengan menuju SMPN 2 Kunduran belum memenuhi kualitas standar pelayanan, hal ini disebabkan SMPN 2 Kunduran yang berada jauh dari pusat kota Blora dan jalan yang rusak parah dengan kondisi aspal sudah mengelupas lubang besar dimana mana menyebabkan untuk mencapai SMPN 2 Kunduran membutuhkan kewaspadaan dan waktu lebih.

Identifikasi Aspek Penghambat Pelayanan Sekolah Inklusif di SMPN Kunduran Blora, Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi secara faktual dan relevan, maka penulis menemukan aspek yang menghambat kualitas pelayanan sekolah inklusif di SMPN 2 Kunduran Blora, Jawa Tengah.

1. *Tangible* (Berwujud)

Berkaitan dengan aspek *tangible* atau berwujud, dalam penelitian kualitas

pelayanan sekolah inklusif di SMPN 2 Kunduran Blora, Jawa Tengah meliputi indikator kelengkapan fasilitas. Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dilihat bahwa aspek *tangible* belum memenuhi standar pelayanan, SMPN 2 Kunduran tidak memiliki alat penunjang atau fasilitas khusus seperti, tangga landai, dan jalur pemandu. Harga yang mahal untuk setiap unit alat penunjang menyebabkan SMPN 2 Kunduran belum memiliki fasilitas penunjang.

2. *Reliable* (Kehandalan)

Berkaitan dengan aspek reliable atau kehandalan yang meliputi indikator kompentensi pegawai, apabila dilihat dalam kualitas pelayanan sekolah inklusif adalah kompetensi guru pendamping khusus. Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa SMPN 2 Kunduran tidak memiliki guru pendamping khusus yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengajar anak inklusif. Hal ini disebabkan karena guru

pendamping yang dijanjikan pada waktu awal penunjukan sekolah inklusif tidak kunjung datang.

3. Acces (Kemudahan)

Berkaitan dengan aspek *acces* atau kemudahan yang meliputi indikator yaitu kemudahan menjangkau lokasi. Berdasarkan dokumentasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa akses menuju lokasi SMPN

2 Kunduran belum memenuhi standar kualitas hal ini disebabkan karena lokasi SMPN 2 Kunduran jauh dari pusat kota Blora dan jalan menuju ke SMPN 2 Kunduran sudah rusak parah dengan kondisi aspal mengelupas dan lubang besar di sepanjang jalan. Kondisi jalan yang rusak parah akan menyebabkan kewaspadaan dan waktu tempuh yang bertambah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan inklusif di SMPN 2 Kunduran belum memenuhi standar yang diharapkan dari pelayanan sekolah inklusif. Hal ini dibuktikan dari 5 aspek yang diteliti, 3 diantaranya masih memenuhi standar pelayanan yaitu:

- 1. Tangible (Bukti Fisik), SMPN 2 Kunduran tidak memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang membantu anak inklusif dalam kegiatan belajar mengajar. SMPN 2 Kunduran tidak memiliki fasilitas disebabkan adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki, harga untuk satu unit fasilitas sangat mahal, selain itu bantuan yang dijanjikan dari dinas pada saat awal penunjukan SMPN 2 Kunduran sebagai sekolah inklusif tidak kunjung datang.
- Reliable (Kehandalan), SMPN
 Kunduran tidak memiliki guru pendamping khusus yang

- memiliki belakang latar sekolah luar biasa.Program pelatihan yang diberikan hanya satu kali pada saat awal penunjukan SMPN 2 Kunduran menjadi penyelenggara sekolah inklusif di Kabupaten Blora. menangani Untuk masalah anak inklusif SMPN 2 Kuduran hanya mengandalkan guru BK untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anak inklusif.
- *3.* dan Acces (Kemudahan melakukan kontak). lokasi SMPN 2 Kunduran sangat jauh dari pusat kota Blora dan jalan sudah rusak berat dengan kondisi aspal mengelupas, lubang besar dan dalam dan saat musim penghujan dapat membahayakan siswa atau walimurid yang mengantar anak mereka untuk bersekolah karena lubang tertutup oleh genangan air.

B. Saran

- 1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyediaan fasilitas penunjang operasional sekolah membantu yang meningkatkan pelayanan pendidikan inklusif, maka penulis merekomendasikan kepada SMPN 2 Kunduran untuk melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi untuk membantu ketersediaan fasilitas penunjang kepada anak inklusif.
- 2. Untuk meningkatkan pelayanan sekolah inklusif dalam aspek kehandalan atau reliable, SMPN 2 Kunduran dapat meminta bantuan dari dinas pendidikan provinsi atau pusat untuk mengirim guru pendamping khusus yang memiliki latar belakang pendidikan khusus yang disesuaikan ienis dengan inklusif di SMPN 2 Kunduran.
- 3. Untuk meningkatkan kompetensi guru yang bukan pendamping, diperlukan program pelatihan dan studi banding ke sesama **SMP** inklusif atau ke sekolah luar biasa setiap bulan, bertujuan untuk saling bertukar informasi dan berdiskusi dalam mencari solusi bersama apabila terdapat masalah yang bersangkutan dengan anak inklusif.
- 4. Untuk memudahkan akses menuju **SMPN** 2 lokasi Kunduran yang masih berlubang dan mengalami kerusakan berat, perlu adanya kolaborasi dinas antara pendidikan dan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Blora untuk memperbaiki jalan menuju lokasi SMPN 2 Kunduran.

DAFTAR PUSTAKA Sumber Rujukan:

- Anggraini, Jum. 2012. Hukum administrasi Negara. Jakarta :
 Graha Ilmu.
- Damai Darmadi, Sukidin. *Adminsitrasi Publik*. Yogyakarta :

 LaskbangPress Indo.
- Dwi yanto, Agus. 2012. Manajemen

 pelayanan Publik : Peduli

 Inklusif, dan Kolaboratif.

 Yogyakarta : Gadjah Mada

 University Press.
- Hariani, Dyah. 2017. *Buku Ajar Azas – Azas Manajemen*. Semarang:

 UPT Undip Press Semarang.
- Hasibuan, Malayu. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

 EdisiRevisi. Jakarta: Bumi

 Aksara.

- Hardiansyah. 2011. *KualitasPelayanan Publik*. Yogyakarta:

 PENERBIT Gava Media
- Indonesia, P. R. (2009) UU Nomor 25

 Tahun 2009

 Tentang"Pelayanan

 Publik", UU Nomor 25 Tahun

 2009 Tentang"Pelayanan

 Publik".
- Keban, Yeremias T. *Enam Dimensi***Adminsitrasi Publik. 2014.

 Yogyakarta: Penerbit Gava

 Media
- Kustiawan,Deddy. 2013. Mengenal

 Pendidikan inklusif dan

 Pendidikan Layanan Khusus

 serta Implementasinya.

 Jakarat:Luximia
- Kemendikbud. 2016. Gambaran

 Sekolah Inklusif Di Indonesia:

- Tinjauan Sekolah Menengah
 Pertama. Jakarta: Pusat Data
 dan Statistik Pendidikan dan
 Kebudayaan.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja*Sektor Publik. Yogyakarta:

 UPP AMP. YKPN.
- Moenir. 2002. *Maanajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta:

 PT. Bumi Aksara.
- Moleong. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.

 Remaja

 Rosdakarya.
- Negara, M. P. A. 2003 Keputusan

 Menteri Pendayagunaan

 AparaturNegara Nomor

 63/KEP/M.PAN/7/2003

Pedoman

Umum

Tentang

- Penyelenggaraan Pelayanan Publik", p. 21.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*.
 Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori*Administrasi Publik. Bandung

 :CV Alfabeta.
- Rahmayanty, Nina. 2013. *Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta

 :Graha Ilmu.
- Ratminto & Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*.

 Jogjakarta: Pustaka Belajar
- Syafiie, Inu kencana. *Ilmu***Administrasi.2015.Yogyakarta

 :Pustaka Pelajar.
- Siagian, Sondang P. 2013. *Manajemen*Sumber Daya Manusia. Jakarta:

 PT.Bumi Aksara.

- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian

 Kuantitatif Kualitatif Dan

 R&D. Bandung:Alfabeta.
- Suryono, Agus. 2001. Jurnal

 Administrasi Negara Volume I

 No. 2 Tentang Manajemen

 Pelayanan Publik. Malang.

 FIA.
- Takdir Ilahi. Mohammad. *Pendidikan Inklusif (Konsep dan Aplikasi)*.

 Yogyakarta:AR-RUZZ

 MEDIA

Sumber lain

JURNAL:

- Anggriana, Tyas Martika.DKK. 2016.

 Kompetensi Guru Pendamping
 Siswa ABK di Sekolah Dasar.

 Jurnal Konseling Vol. 2 No. 2.

 Program Studi Bimbingan dan
 Konseling. IKIP PGRI Madiun.
 Diundah pada 23 November
 2019 pukul 15.30 WIB.
- Bachri, Bactiar S.2010. Meyankinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10 No.1, hal.

- 56. Diunduh pada 9 Maret 2022 pukul 10.25 WIB.
- Herawati, Nenden Ineu. Pendidikan Inklusif. UPI Kampus Cibiru Bandung. Diundah pada 23 November 2019 pukul 15.30 WIB.
- Hidayah, Dasep Dodi. 2020. Kualitas Pelayanan Publik: Studi Pelaynana Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Ilmiah administrasi Negara Vol.7 No. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Tasikmalaya.
- Hufron, Achmad.DKK. 2016.

 Manajemen Kesiswaa pada
 Sekolah Inklusif. Jurnal
 Pendikan Humaniora Vol.4
 No.2, hal 95-105. Universitas
 Negeri Malang. Diunduh pada
 23 November 2019 Pukul
 15.45 WIB.
- Indriany, Ika Arinia. 2015. Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Difabel: Studi Tentang Layanan Pendidikan Inklusif melalui Kasus Pemindahan Difabel dari Sekolah Reguler ke Sekolah Luar Biasa di Yogyakarta. INKLUSI, Vol.2 No.1, Universitas Gadjah Mada. Diunduh pada 11 November 2019 pukul 18.28 WIB.
- Jokinen, Markku. 2018. *Inclusive Education-A Sustainable*

- Approach?. American Annals of the Deaf Vol.163 No. 1. Diunduh pada 23 November 2019 pukul 16.12 WIB.
- Kadir, Abd. 2015. Penyelenggaraan Sekolah Inklusif di Indonesia. Jurnal pendidikan Agama Islam Vol.03 No.1, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Diunduh pada 23 November 2019 pukul 16.01 WIB.
- Kunnath, Suja K. DKK. 2018.

 Perspective of School

 Educators in India on Inklusive

 Education Children with

 Autism Spectrum Disorders.

 Vol. 18 No. 10. Diunduh pada

 23 November 2019 pukul

 16.11. WIB.
- Lehr, Camilla A. DKK. Alternative School Serving Students With and Wihout Dissabilities: What Are the Current Issues and Challenges?. Preventing School Failure Vol. 47 No. 2. Diunduh pada 23 November 2019 pukul 15.59 WIB.
- Malak, Saiful. 2013. Inclusive
 Education Reform in
 Bangladesh: Pre-Service
 Teachers Response to Include
 Students with Special
 educational Needs in Reguler
 Classrooms. Interbatioal
 Journal of Instruction Vol. 6
 No. 1, University of Dhaka.
 Diunduh pada 23 November
 2019 pukul 16.10 WIB.

- Mfuthwana, Thembeka.DKK. 2018.

 Establishing Inclusive School:
 Teacher's Perceptions of
 inclusive education teams.
 South African Journal of
 Education Vol. 38 No.4,
 Stellenbosch University.
 Diunduh pada 23 November
 2019 pukul 10.36 WIB.
- Nina. 2014. **Tekhnik** Nurdiani, Dalam Sampling Snowball Penelitian Lapangan. ComtTech Vol. 5 No. 2 Desember 2014 : 1110-1118.Architecture Departement, **Faculty** of Engineering, Binus University. Diunduh pada 3 Juni 2021.
- Putri, Desita Soviana. 2021. Faktor
 Faktor yang Mempengaruhi
 Kualitas Pelayanan Pada Era
 New Normal di Dinas
 Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Kabupaten
 Gunung Kidul. Jurnal Enersia
 Publika, Vlo. 5, No. 1, hal 342353. Diunduh pada 14
 September 2021pukul 11.00
 WIB.
- Pratomo, Dion Teguh, Sudarsono, Fadli. Muhammad 2015. Pelaksaaan Perlindungan Hak Atas Pendidikan BgiPenyandang Disabilitas Dissability). (People With Skripsi. Program Pasca Sarjana Megister Imu Hukum Universitas Brawijaya

- Malang. Diunduh pada 6 Juli 2020 pukul 13.00 WIB.
- Rukiyat, Yayat. 2017. Kualitas
 Pelayanan Publik Bidang
 Administrasi Kependudukan Di
 Kecamatan Pasir Jambu.
 Program Studi Megister Ilmu
 Adminitrasi. Universitas Nurtia
 Bandung. Diunduh pada 6
 februari 2022 pukul 20.00 WIB
- Sagita, Dessy. 2016. Pengembangan Modul Empati Siswa Bagi Guru di Sekolah Inklusi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.5 No. 1. Diunduh pada 6 September 2021 pukul 23.00 WIB.
- SULTHON.2019. Pendidikan Dasar Inklusif Kabupaten Pati: Harapan dan Kenyataan. Journal of Dissability Studies Vol.6 No.1, Insititut Agama Islam Negeri Kudus. Diunduh pada 22 November 2019 pukul 00.06 WIB.
- Suhartoyo. 2019. Implementasi Fungsi
 Pelayanan Publik dalam
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 (PTSP). Adminitrative Law &
 Governance Journal. Fakultas
 Hukum, Universitas
 Diponegoro. Diunduh pada
 23November 2019 pukul 15.30
 WIB.
- Silalahi. A.F.L, Syafruddin, R. & Beby, M.B.2019. Kualitas Pelayanan Publik dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Badan

- Pelayanan Perizinan Terpadu Quality of Public Services in Granting Building Permits at Integrated Licensing Service Agencies. PERSPEKTIF. Program Studi Adimistrasi Publik, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Indonesia Dan Program Komunikasi, Ilmu Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Indonesia. Diundah pada 21 November 2019 pukul 15.30 WIB.
- Wicaksono, Tio Tegar dkk. *Pelayanan Umum Kereta Api Di Yogyakarta Bagi Difabel*.2019.

 Journal of Disability Studies.
 Universitas Gadjah Mada.
 Diundah pada 23 November 2019 pukul 15.30WIB.
- Witasoka, Dyah.2016. Manajemen
 Pendidikan Inklusif SMA
 Muhammadiyah di Kota
 Yogyakarta. Journal of
 Dissability Studies Vol.3 No.2,
 Universitas Negeri Yogyakarta.
 Diunduh pada 11 November
 2019 pukul 19.38 WIB.
- Zakia, Dieni Laylatul. 2015. Guru Pendamping Khusus (GPK):
 Pilar Pendidikan Inklusi.
 Program Magister Pendidikan Luar Biasa UNS. Diunduh pada 03 September 2021 pukul 17.48 WIB.

INTERNET

https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/3751/hdi-2021---bupati-ingin-permudah-akses-pendidikan--kesehatan-dan-ekonomi-difabel. Diunduh pada 18 Januari 2022 pukul 13.00

https://www.blorakab.go.id/index.php/public/profil/index/164. Diunduh pada 29 Juni 2021 pukul 17.08 WIB.

https://radarkudus.jawapos.com/blora/ 27/05/2022/jemput-bola-sasarpendataan-enam-ribu-difabel/. Diunduh pada 29 Juni 2022 Pukul 09.45 WIB.